

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Terjadinya arus migrasi penduduk yang deras dari pulau Jawa untuk menjadi kuli kontrak di Sumatera berlangsung menjelang terjadinya depresi ekonomi dunia. Para penduduk miskin di Jawa yang terutama berada di desa-desa terpencil, dibawa ke Sumatera Timur untuk di jadikan pekerja di sejumlah perkebunan di wilayah tersebut. Selain itu pemerintah kolonial Belanda mengubah kebijakan kolonisasi, dengan menciptakan koloni penduduk asal Jawa di perkebunan-perkebunan yang telah mereka buat

Pembukaan Onderneming (perkebunan besar) yang dilaksanakan oleh perusahaan perkebunan asing (orang-orang Eropa) baik Hindia Belanda maupun perusahaan asing lainnya yang dilindungi oleh Pemerintah Hindia Belanda

Bersamaan dengan pesatnya pembukaan lahan baru untuk perkebunan tembakau, tahun 1890-1920 adalah era dimana masuknya gelombang kuli untuk bekerja di perkebunan tembakau swasta milik Belanda datang secara besar-besaran. Para kuli yang disebut kuli kontrak adalah kebanyakan dari Jawa. Kebanyakan dari mereka tertipu oleh bujukan para agen pencari kerja yang mengatakan kepada mereka bahwa Deli adalah tempat dimana pohon yang berdaun uang (metafor dari tembakau). Dijanjikan akan kaya raya

namun kenyataannya mereka dijadikan budak. Selama puluhan tahun mereka menjalani kehidupan yang sangat tidak manusiawi, upah yang sangat rendah, perlakuan kasar majikan

Perkembangan yang pesat dalam pembangunan perkebunan ini, karena pada masa itu Belanda sudah mulai memasuki era imperialisme modern dengan memberlakukan Undang-Undang Agraria tahun 1870 bagi seluruh wilayah Hindia

Belanda, yang menciptakan iklim kemantapan berusaha bagi para pengusaha Belanda atau orang lainnya. Berangkat ke Sumatera dengan moda transportasi Kapal Api pada waktu itu bukanlah hal yang mudah, konon memakan waktu cukup lama untuk sampai ke tempat tujuan dan selama di perjalanan mengalami banyak kesusahan karena perbekalan yang seadanya dan peralatan yang tidak memadai. Banyak juga orang yang meninggal dunia di perjalanan sebelum sampai di tempat tujuan yaitu tanah Deli di Sumatera Utara. Kita berharap agar generasi berikutnya yaitu putra Jawa kelahiran Sumatera tidak melupakan sejarah ini, sebagaimana yang dikatakan Bung Karno “Jas Merah” Jangan sekali-kali melupakan sejarah.

Sesampainya di tempat tujuan mereka bersujud syukur seraya berikrar mengikat tali persaudaraan yang begitu kuat yang terkenal dengan sebutan “Sedulur Tunggal Sekapal”. Selain ke Sumatera pada decade yang sama orang Jawa oleh Kolonial Hindia Belanda juga dikirim ke Suriname sebagai “Buruh Kontrak”. Sebutan “Tunggal sekapal” sebagai ikatan perseduluran

sebaiknya jangan dilupakan dan dapat dijadikan tagline untuk memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan, memupuk solidaritas, integritas, membangun nilai dan jati diri agar menjadi lebih baik.

Orang Jawa di Suriname masih memegang teguh adat istiadat leluhur dan berupaya melestarikan hingga sekarang. Lain halnya di Sumatera budaya Jawa sudah mulai luntur dan generasi berikutnya mengalami “penyakit lupa budaya”, kebanyakan sudah tidak lagi bisa ngomong Jawa, bahkan kesenian Jawa seperti wayang, gamelan dan lainnya sudah jarang dimainkan. Hal ini bisa dimaklumi akibat penetrasi budaya asing imbas dari era globalisasi saat ini. (*DPD pujakesuma siantar*)

Para sesepuh Jawa pada era tahun 1970 an sangat prihatin melihat gejala “penyakit lupa budaya” pada generasi Jawa berikutnya di Sumatera Utara. Oleh sebab itulah mereka yang dipelopori H. Mas Soekardi dan kawan - kawan mendirikan Badan Koordinasi Kesenian Jawa (BKKJ). BKKJ diperuntukkan bagi orang-orang muda agar mereka tidak lupa dengan adat istiadat dan kebudayaannya (**Sudjono**

Giatmo.Wspd.1993) BKKJ merupakan cikal bakal berdirinya Pujakesuma dimana pada tanggal 10 Juli 1982 dilakukan Musyawarah Daerah pertama. Sejak itu masyarakat Jawa yang ada di daerah ini dihimpun dalam satu wadah dinamakan Pujakesuma. Dengan demikian saat itu BKKJ sudah melebur menjadi satu dgn Pujakesuma.

Pujakesuma cultur sesuai dengan namanya, maka putra-putri Jawa yang lahir dan berkedudukan di Sumatera bisa dikatakan “Pujakesuma”. Secara Struktur Ketua Umum DPP PKB Pujakesuma saat ini sesuai Keputusan Kemendagri dan Kemenkumham diemban oleh H. Suratman, Sekretaris Umum H. Suherdi dan Bendahara Umum Suratno Gurdi berkedudukan di Medan.

Didirikannya Organisasi Kemasyarakatan Pujakesuma bertujuan mensejahterakan masyarakat Jawa, menggali, membina dan mengembangkan kesenian, kebudayaan serta bekerjasama dengan organisasi social budaya lainnya dalam membina persatuan. Salah satu fungsinya menampung dan memperjuangkan aspirasi masyarakat dengan tidak mengenal perbedaan suku, agama dan golongan.

Sementara itu dari hasil sensus penduduk nasional 2010 jumlah penduduk Prov. Sumut sebesar 12.985.075 jiwa dengan penambahan penduduk 1% maka penduduk Sumut tahun 2011 sekitar 13,1 juta jiwa.

Dengan komposisinya terdiri dari:

1. Etnis Melayu, sekitar 5,47 juta atau 42%;
2. Etnis Batak Keseluruhan (Toba, Mandailing, Simalungun, Nias, Angkola, Pakpak, dan Karo), sekitar 4,5 juta jiwa atau 35%;
3. Etnis Jawa (Suku Jawa, Sunda/Banten, dan Madura), sekitar 2,15 juta jiwa atau 16,5%;

4. Etnis atau suku lain, terdiri dari Tionghwa, Minang, Aceh, dll hampir 1 juta jiwa atau sekitar 6%;

Sementara itu dari sumber badan pusat statistik kabupaten Langkat tahun 2014 tentang jumlah penduduk yang ada dikecamatan stabat, kabupaten Langkat adalah sebesar 85.589 jiwa dengan persentase penduduk

Pada pemilihan umum kepala daerah kabupaten Langkat 2013/2018 dengan 2 kandidat calon penerima suara terbanyak dari calon-calon lainnya yaitu antara Bapak H. Ngogesa Sitepu, SH dan pasangannya dengan Bapak Boediono, SE dengan pasangannya, dari survey jumlah penduduk dan angka hitungan matematis sentimen etnis maka jelas Bapak H, Ngogesa Sitepu kalah karena etnis Karo tidak sebanyak etnis Jawa yang ada di Langkat.

Menurut Wakil Ketua Satgas Joko Tingkir, Kabupaten Langkat, Misno Adi, Selama ini warga Jawa terkesan dipecah-pecah dan terkotak-kotak, sehingga tidak lagi menjadi satu kekuatan yang besar dan menentukan.

Warga Jawa di Sumatera mestinya dapat mengikuti atau mencontoh model integritas dan nilai yang dilakukan oleh sedulur-sedulur di Suriname, sampe bisa menduduki 5 orang Menteri dan menjadi ketua Parlemen disana.

Padahal orang Jawa hanya 15-17% dari jumlah penduduk di Suriname.

(DPD pujakesuma siantar)

Pertanyaan yang sangat mendasar adalah mengapa? Suku Jawa yang ada diangkat tidak dapat menduduki posisi jabatan bupati langkat? Maka peneliti akan mengkaji dari calon yang ada di pemilihan bupati langkat 2013/2018 kemarin serta akan mengangkat profil dari calon bupati dan wakil bupati tersebut.

1. Yunus saragih dan sahmadi fiddin
2. Abdul azzis dan sutiarnoto
3. Budiono dan abdul khair
4. Ngogesa sitepu dan sulistianto

Dari nama nama diatas peneliti menganalisis bahwa calon bupati dan wakil bupati yang ada didominasi dari suku Jawa sehingga potensi perpecahan suara jelas tampak akan terjadi, selain dari faktor perpecahan suara dengan banyaknya calon dari satu suku, tentu akan tampak jelas bahwa ada faktor tingkat kepopuleran calon tersebut mempengaruhi dia terpilih dalam bursa pemimpin di langkat. Setelah itu juga adanya faktor bahwa suku Jawa menjadi penentu kemenangan untuk menduduki kursi langkat 1.

Menurut juru bicara pasangan Cabup/Cawabup Ngogesa Sitepu-Sulistianto, Dr Razman Arif Nasution quick count mengambil sampel 69.412 pemilih dari 698.300 pemilih berdasarkan DPT Langkat di 23 kecamatan di daerah itu.

1. Pasangan Budiono-Abdul Khair, 134.648 suara atau 20,95 persen
2. Pasangan Abdul Aziz-Suharnoto, 3.997 suara atau 5,72 persen.
3. Pasangan Ahmad Yunus Saragih-Syahmadi Fiddin, 1.359 suara atau 1,94

persen

4. Pasangan Ngogesa Sitepu-Sulistianto, 49.918 suara atau 71,39 persen.

Hasil quikcount tersebut menunjukkan bahwa Bupati incombent memperoleh suara yang cukup besar dibandingkan calon lainnya, jika menelisik dari angka dan presentase jumlah penduduk yang ada maka kua berfikir mengapa hampir setiap calon bupati langkat memilih pasangan dari suku jawa? Atau pasangan bersuku jawa memilih pasangan dari suku melayu?

Untuk menjadi pemimpin Langkat di tanah melayu tidak semudah membalik telapak tangan, dari mulai persaingan politik yang begitu kompetitif, dari isu kesukuan, ketokohan, dan sampai kekuatan finansial, bisa menjadi penentu. Namun yang menjadi konsentrasi para calon pemimpin di kabupaten Langkat adalah suara etnis jawa yang menjadi penentu kemenangan mereka, sehingga setiap pasangan harus menggandeng etnis jawa. Dari data yang ada Kabupaten Langkat dengan jumlah penduduk yang begitu banyak lebih kurang mencapai 1.042.523 Jiwa dengan rincian mayoritas penduduk kabupaten Langkat adalah etnis Jawa yang mencapai 56,87 %, diikuti oleh Melayu dan Karo. Melayu dan Karo adalah penduduk asli Kabupaten Langkat dengan persentase masing-masing 14,93 persen dan 10,22 persen, Tapanuli / Toba (4,50 persen), Madina (2,54 persen) dan lainnya (10,94 persen). Jumlah penduduk Jawa yang besar, terutama terkait dengan banyaknya perkebunan yang umumnya karyawannya adalah etnis Jawa. Kemudian di Kabupaten Langkat, juga terdapat daerah transmigrasi di Kecamatan Sei Lapan yang umumnya berasal dari Pulau Jawa.

(data terakhir dari BPS 2011). Apabila di analisis dari data statistik yang ada maka pasangan jawa akan menjadi faktor penentu.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dipaparkan diatas, maka penulis menarik identifikasi masalahnya adalah :

1. Eksistensi pujakesuma terhadap politik lokal

1.3. Rumusan masalah

1. Bagaimana masyarakat jawa menilai etnisitas mereka terhadap politik lokal?
2. Apa faktor yang menyebabkan pasangan calon suku lain memilih suku jawa sebagai pasangan politiknya?

1.4. Tujuan Masalah

1. Untuk mengetahui bagaimana masyarakat jawa menilai etnisitas mereka terhadap politik lokal..
2. Untuk mengetahui Apa faktor yang menyebabkan pasangan calon suku lain memilih suku jawa sebagai pasangan politiknya

1.5. Manfaat penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Secara teoritis

Secara teoritis penulis dapat berbagi ilmu pengetahuan dan dapat mengaplikasikan ilmu yang penulis terjun dimasyarakat langsung tentang ilmu sistem politik di indonesia dan politik lokal yang dikembangkan oleh anthony giddens dan castels serta berguna bagi mahasiswa pendidikan antropologi unimed sebagai pembaca.

2. Secara praktis

Secara praktis dapat memberikan sumbangsih pemikiran bagi pelaku politik baik pemerintahan atau non pemerintahan agar dapat mengetahui pengaruh politik identitas dilangkat.